

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RISIKO

NOMOR 32 /PR/2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RISIKO NOMOR 14/PR/2024 TENTANG PEMBENTUKAN TIM DALAM RANGKA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI PADA DIREKTORAT PENGELOLAAN DUKUNGAN PEMERINTAH DAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR TAHUN ANGGARAN 2024

DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RISIKO,

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka mendukung Direktorat Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur sebagai unit pelaksana reformasi birokrasi dalam pembangunan ZI menuju WBBM, telah dibentuk Tim Dalam Rangka Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Pada Direktorat Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur Tahun Anggaran 2024 melalui Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Nomor 14/PR/2024;
  - b. bahwa mengingat terdapatnya alih tugas pegawai, perlu dilakukan penyesuaian terhadap susunan Tim Dalam Rangka Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Pada Direktorat Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur Tahun Anggaran 2024;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Nomor 14/PR/2024 Tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Pada Direktorat Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  - 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137);
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  7. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
  8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 977);
  9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 370/KMK.1/2021 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi atau Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian Keuangan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RISIKO TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RISIKO NOMOR 14/PR/2024 TENTANG PEMBENTUKAN TIM DALAM RANGKA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI PADA DIREKTORAT PENGELOLAAN DUKUNGAN PEMERINTAH DAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR TAHUN ANGGARAN 2024.

PASAL I

Mengubah Lampiran Keputusan Direktur Jenderal

Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Nomor 14/PR/2024 tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Pada Direktorat Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur Tahun Anggaran 2024, sehingga menjadi sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko ini.

## PASAL II

1. Ketentuan-ketentuan lain yang ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Nomor 14/PR/2024 tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Pada Direktorat Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur Tahun Anggaran 2024 dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak dilakukan perubahan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko ini.
2. Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko;
2. Para Direktur di Lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko;
3. Direktur Utama Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional;
4. Para Kepala Subdirektorat dan Kepala Bagian di Lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 26 Maret 2024

DIREKTUR JENDERAL  
PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RISIKO,



Ditandatangani secara elektronik  
SUMINTO



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL  
PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RISIKO  
NOMOR 32 /PR/2024 TENTANG  
PERUBAHAN KEPUTUSAN DIREKTUR  
JENDERAL PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN  
RISIKO NOMOR 14/PR/2024 TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM DALAM RANGKA  
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU  
WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI  
PADA DIREKTORAT PENGELOLAAN  
DUKUNGAN PEMERINTAH DAN PEMBIAYAAN  
INFRASTRUKTUR TAHUN ANGGARAN 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN

TIM DALAM RANGKA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH  
BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI PADA DIREKTORAT PENGELOLAAN  
DUKUNGAN PEMERINTAH DAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR TAHUN  
ANGGARAN 2024

**I. Pengarah**

Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko

**II. Penanggung Jawab**

Direktur Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan  
Infrastruktur

**III. Tim Pelaksana**

- |                           |                  |                |
|---------------------------|------------------|----------------|
| 1. Yonathan Setianto Hadi | Direktorat PDPPI | Ketua          |
| 2. Jimmy Situmorang       | Direktorat PDPPI | Wakil Ketua I  |
| 3. Lalu Taruna Anugerah   | Direktorat PDPPI | Wakil Ketua II |

**IV. Kelompok Kerja**

**A. Kelompok Kerja Manajemen Perubahan**

- |                          |                  |               |
|--------------------------|------------------|---------------|
| 1. Muhammad Ngafifi      | Direktorat PDPPI | Koordinator   |
| 2. Slamet Rona Ircham    | Direktorat PDPPI | Sekretaris I  |
| 3. Agwin Dwiputradi      | Direktorat PDPPI | Sekretaris II |
| 4. Ikhsan Rifaldi        | Setditjen PPR    | Anggota       |
| 5. Deni Putra Maharta    | Direktorat PDPPI | Anggota       |
| 6. Herlina Oktavianti    | Direktorat PDPPI | Anggota       |
| 7. Muhammad Bagus Alfian | Direktorat PDPPI | Anggota       |
| 8. Novian Dika Setya     | Direktorat PDPPI | Anggota       |
| 9. Marina Ayuningtyas    | Direktorat PDPPI | Anggota       |
| 10. Halimatus Sakdiyah   | Setditjen PPR    | Anggota       |

**B. Kelompok Kerja Tata Laksana**

- |                         |                  |               |
|-------------------------|------------------|---------------|
| 1. I Wayan Sutana       | Direktorat PDPPI | Koordinator   |
| 2. Valentia Febrianty   | Direktorat PDPPI | Sekretaris I  |
| 3. Gia Nugraha          | Direktorat PDPPI | Sekretaris II |
| 4. Farouq Widya Pramana | Setditjen PPR    | Anggota       |

5.	Dian Mayasari	Direktorat PDPPI	Anggota
6.	Boston Hatorangan Manurung	Direktorat PDPPI	Anggota
7.	Surya Susiratmaka	Direktorat PDPPI	Anggota
8.	Muhammad Akbar	Direktorat PDPPI	Anggota
9.	Panggali Luhung Budiadi	Setditjen PPR	Anggota
10.	Muhammad Teguh Kurniawan	Setditjen PPR	Anggota

**C. Kelompok Kerja Penataan Sistem Manajemen SDM**

1.	Hendro Ratnanto Joni	Direktorat PDPPI	Koordinator
2.	Lukman Zainul Hakim Harahap	Direktorat PDPPI	Sekretaris I
3.	David Rizkiawan	Direktorat PDPPI	Sekretaris II
4.	Asti Mashita	Setditjen PPR	Anggota
5.	Anggi Putri	Direktorat PDPPI	Anggota
6.	Indra Gunawan	Direktorat PDPPI	Anggota
7.	Annisaul Rofiqoh	Direktorat PDPPI	Anggota
8.	Mokhammad Ardafillah	Direktorat PDPPI	Anggota
9.	Muhammad Prakosa Suprpto	Setditjen PPR	Anggota

**D. Kelompok Kerja Penguatan Akuntabilitas Kinerja**

1.	Hariyudo Fajar Yuwono	Direktorat PDPPI	Koordinator
2.	Esti Ismiyati	Direktorat PDPPI	Sekretaris I
3.	Dadang Jusron	Direktorat PDPPI	Sekretaris II
4.	Ramli Indrasyah Lubis	Setditjen PPR	Anggota
5.	Sevi Wening Perwitasari	Direktorat PDPPI	Anggota
6.	Bella Septika Medianti	Direktorat PDPPI	Anggota
7.	Angella Aprillia	Direktorat PDPPI	Anggota
8.	Oksita Putrining Yansri	Direktorat PDPPI	Anggota
9.	Andryan Wachid Pambudi	Setditjen PPR	Anggota

**E. Kelompok Kerja Penguatan Pengawasan**

1.	Intan Diati Al-Yani	Direktorat PDPPI	Koordinator
2.	Aldillah Arumandani	Direktorat PDPPI	Sekretaris I
3.	Ida Charlina Limbong	Direktorat PDPPI	Sekretaris II
4.	Diah Chandrakirana	Setditjen PPR	Anggota
5.	Putri Marina Debora	Direktorat PDPPI	Anggota
6.	Seta Alfakih Bani Subagyo	Direktorat PDPPI	Anggota
7.	Bilayat Bagas Arista Putra	Direktorat PDPPI	Anggota

- |    |                    |                  |         |
|----|--------------------|------------------|---------|
| 8. | Pansa Angga Riva   | Direktorat PDPPI | Anggota |
| 9. | Widi Anggita Putri | Setditjen PPR    | Anggota |

**F. Kelompok Kerja Penguatan Kualitas Pelayanan Publik**

- |     |  |                  |               |
|-----|--|------------------|---------------|
| 1.  | Aulia Ihsanin                            | Direktorat PDPPI | Koordinator   |
| 2.  | Hasrul                                   | Direktorat PDPPI | Sekretaris I  |
| 3.  | Muhammad Satrio Bakti<br>Prathama Basuki | Direktorat PDPPI | Sekretaris II |
| 4.  | Wawan Sugiyarto                          | Setditjen PPR    | Anggota       |
| 5.  | Bangun Rokhmat Trigumanti                | Setditjen PPR    | Anggota       |
| 6.  | Arif Arfanda Rudini                      | Direktorat PDPPI | Anggota       |
| 7.  | Erin Astuti                              | Direktorat PDPPI | Anggota       |
| 8.  | Eko Agus Purwanto                        | Direktorat PDPPI | Anggota       |
| 9.  | Ega Christy                              | Direktorat PDPPI | Anggota       |
| 10. | Putrida Sihombing                        | Direktorat PDPPI | Anggota       |
| 11. | Hanifah Seryaningrum                     | Setditjen PPR    | Anggota       |

DIREKTUR JENDERAL  
PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RISIKO,



Ditandatangani secara elektronik  
SUMINTO

